

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan penjelasan mengenai teori dan kebijakan yang berkaitan dengan tema penelitian yang bersumber dari studi literatur, seperti dijelaskan berikut :

#### **1.1. Pengelolaan Wilayah Pesisir**

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia penting dilaksanakan secara berkelanjutan untuk pengembangan sektor perikanan secara optimal. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat dirangkum beberapa definisi sebagai berikut:

1. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
2. Batas ke arah darat secara ekologis meliputi bagian darat, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat- sifat laut seperti angin laut, pasang surut, perembesan air laut (intrusi) yang dicirikan oleh vegetasinya yang khas.
3. Batas ke arah darat secara administratif yaitu batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau jarak definitif 2 km, 20 km dari garis pantai. Batas ke arah daratan ditetapkan sesuai dengan batas kecamatan untuk kewenangan provinsi.
4. Batas ke arah laut mencakup dari daerah paparan benua dimana ciri- ciri perairan ini masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar maupun proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran

Gambar 2 | Pengelolaan Pesisir



(Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan)

Berdasarkan Gambar 2.1 Menurut Undang-undang No 1 tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. Dalam melakukan budidaya perikanan di wilayah pesisir harus melakukan Izin Lokasi, yaitu izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasaan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil. Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut:

1. Konservasi
2. Pendidikan dan pelatihan
3. Penelitian dan pengembangan

4. Budidaya laut
5. Pariwisata
6. Usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari
7. Pertanian Organik
8. Peternakan
9. Pertahanan dan Keamanan Negara

Dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, negara bertanggung jawab atas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam bentuk penguasaan kepada pihak lain (perseorangan atau swasta) melalui mekanisme perizinan. Pemberian izin kepada pihak lain tersebut tidak mengurangi wewenang negara untuk membuat kebijakan (beleid), melakukan pengaturan (regelendaad), melakukan pengurusan (bestuursdaad), melakukan pengelolaan (beheersdaad), dan melakukan pengawasan (toezichthoudensdaad) Dengan demikian, negara tetap menguasai dan mengawasi secara utuh seluruh Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Subagiyo, Wijayanti, & Zakiyah, 2017).

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga dilakukan dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengakui dan menghormati Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketentuan masyarakat hukum adat umumnya memiliki konsep pada pengelolaan pesisir berbasis kearifan lokal yang tidak merusak lingkungan.

## **1.2. Minapolitan**

### **1.2.1. Pengertian Minapolitan**

Minapolitan merupakan upaya percepatan pengembangan pembangunan kelautan dan perikanan pada sentra-sentra produksi perikanan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pengembangan minapolitan bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan, produktivitas usaha, dan meningkatkan kualitas produk kelautan dan perikanan, meningkatkan pendapatan nelayan, pembudidayaan dan pengolah ikan yang adil serta mengembangkan kawasan

minapolitan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di daerah dan sentra-sentra produksi perikanan sebagai penggerak ekonomi rakyat (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.12 Tahun 2010 Tentang Minapolitan). Sasaran pengembangan minapolitan adalah ekonomi rumah tangga masyarakat kelautan dan perikanan skala kecil makin kuat, usaha kelautan dan perikanan kelas menengah keatas makin bertambah dan berdaya saing tinggi, serta sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi nasional (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/Permen-KP/2014 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014).

### **1.2.2. Konsep Kawasan Minapolitan**

Konsep kawasan minapolitan adalah wilayah yang berbasis pada keanekaragaman fisik dan ekonomi tetapi memiliki hubungan erat dan saling mendukung satu sama lain secara fungsional dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kawasan sentra perikanan budidaya (minapolitan) merupakan kota perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha minabisnis serta mampu melayani, mendorong dan menarik kegiatan pembangunan perikanan di wilayah sekitarnya.

Dasar dari pengembangan kawasan minapolitan adalah dengan membagi wilayah- wilayah yang berhubungan secara fungsional dalam satu sistem kegiatan, yaitu (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.18 Tahun 2011, tentang Pedoman Umum Minapolitan) tentang Pedoman Umum Minapolitan):

1. Minapolitan Centre yaitu pusat pengumpul dan pemasaran
2. Minapolitan District yaitu kawasan pusat pertumbuhan
3. Hinterland atau satuan kawasan perikanan

Konsep pengembangan struktur tata ruang kawasan minapolitan terbagi ke dalam struktur hierarki sistem kota-kota minapolitan sebagai berikut (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.18 Tahun 2011, tentang Pedoman Umum Minapolitan) tentang Pedoman Umum Minapolitan):

1. Orde yang paling tinggi (minapolitan centre) dalam lingkup wilayah minapolitan skala besar berfungsi sebagai:
  - a. Kota perdagangan yang berorientasi ekspor ke luar kabupaten (regional, nasional dan internasional) dengan aksesibilitas yang terbaik di dalam kawasan
  - b. Pusat berbagai kegiatan manufacturing final industry perikanan (packing), stok pergudangan dan perdagangan bursa komoditas
  - c. Pusat berbagai kegiatan tersier minabisnis, jasa perdagangan, asuransi perikanan, perbankan dan keuangan
  - d. Pusat berbagai pelayanan termasuk general agro-industry services
  
2. Orde kedua (pusat distrik minapolitan/ minapolitan district) yang berfungsi sebagai:
  - a. Pusat perdagangan wilayah yang ditandai dengan adanya pasar- pasar grosir dan perdagangan sejenis
  - b. Pusat kegiatan mina-industri berupa pengolahan barang perikanan jadi dan setengah jadi serta kegiatan mina-bisnis
  - c. Pusat pelayanan agro-industri khusus (special mina-industry services), pendidikan, pelatihan, dan pemuliaan komoditas unggulan.
  - d. Orde ketiga (pusat satuan kawasan perikanan/hinterland)
  - e. Pusat perdagangan lokal, ditandai dengan adanya pasar lokal harian
  - f. Pusat koleksi komoditas perikanan yang dihasilkan sebagai bahan mentah industri
  - g. Pusat penelitian, pembibitan dan percontohan komoditas
  - h. Pusat pemenuhan pelayanan kebutuhan permukiman
  - i. Koperasi dan informasi pasar barang perdagangan

Berdasarkan pada penjelasan konsep kawasan minapolitan tersebut, diharapkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara terintegrasi, berkualitas dan berakselerasi tinggi (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.18 Tahun 2011 ,Tentang Pedoman Umum Minapolitan):

1. Prinsip integrasi, diharapkan dapat mendorong agar pengalokasian sumber daya pembangunan direncanakan dan dilaksanakan secara menyeluruh atau holistic dengan mempertimbangkan kepentingan dan dukungan stakeholders baik instansi sektoral, pemerintah pusat dan daerah, kalangan dunia usaha maupun masyarakat.
2. Prinsip efisiensi, pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus dilaksanakan secara efisien agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan biaya murah namun mempunyai daya guna tinggi. Dengan konsep minapolitan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara efisien dan pemanfaatannya pun diharapkan akan lebih optimal. Selain itu prinsip efisiensi diterapkan untuk mendorong agar sistem produksi dapat berjalan dengan biaya murah.
3. Prinsip berkualitas, pelaksanaan pembangunan sektor kalautan dan perikanan harus berorientasi pada kualitas, baik sistem produksi secara keseluruhan, hasil produksi, teknologi sumber daya manusia. Dengan konsep minapolitan pembinaan kualitas sistem produksi dan produknya dapat dilakukan secara lebih intensif.
4. Prinsip berakselerasi tinggi, percepatan diperlukan untuk mendorong agar target produksi dapat dicapai dalam waktu cepat, melalui inovasi dan kebijakan terobosan.

### **1.2.3. Pengembangan Wilayah Melalui Kawasan Minapolitan**

Dalam proses pengembangan wilayah harus dipahami terlebih dahulu konsep mengenai wilayah. Menurut Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengertian wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi atau aspek fungsional. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Berdasarkan pengertian tersebut ada dua aspek yang harus diperhatikan dalam konsep wilayah yaitu, pertama di dalam wilayah ada unsur-unsur yang saling terkait yaitu ruang yang berfungsi lindung yang harus selalu dijaga keberadaannya dan ruang yang

berfungsi budidaya sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya untuk kelangsungan hidupnya. Menurut (Alkadri, 1999), pengembangan adalah kemampuan yang ditentukan oleh apa yang dapat dilakukan dengan apa yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas hidup. Kata pengembangan identic dengan keinginan menuju perbaikan kondisi disertai dengan kemampuan untuk mewujudkannya. Salah satu pengembangan wilayah dengan melakukan optimalisasi sumberdaya perairan adalah dengan membangun kawasan minapolitan. Secara bahasa, minapolitan berasal dari kata mina (perikanan) dan politan (Multi kegiatan) yang dapat diartikan sebagai kluster kegiatan perikanan yang meliputi kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran dalam system agribisnis terpadu di suatu wilayah atau lintas wilayah perikanan dengan kelengkapan sarana serta prasarana serta pelayanan seperti perkotaan (kelembagaan, system permodalan, transportasi, dan lain-lain).

### **1.3. Evaluasi Program Minapolitan**

Evaluasi program adalah rangkaian kegiatan untuk melihat keberhasilan suatu program. Melakukan evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan (Arikunto, Suharsimi, Safrudin, & Cepi, 2009). Evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah proses pengumpulan data atau informasi yang ilmiah untuk bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternative kebijakan.

Kegiatan evaluasi sangat penting untuk pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program, karena dari masukan hasil evaluasi program itulah para pengambil keputusan akan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan. Wujud dari hasil evaluasi adalah sebuah rekomendasi dari evaluator untuk pengambil keputusan. Ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil dalam pelaksanaan sebuah program keputusan (Arikunto, Suharsimi, Safrudin, & Cepi, 2009)

1. Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.

2. Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan.
3. Melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat.
4. Menyebarkan program (melaksanakan program di tempat- tempat lain atau mengulangi lagi program di lain waktu), karena program tersebut berhasil dengan baik maka dapat dilaksanakan lagi di tempat yang lain.
5. Implementasi suatu program harus senantiasa dievaluasi untuk melihat sejauh mana program tersebut telah berhasil mencapai maksud pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya evaluasi, program-program yang berjalan tidak akan dapat dilihat efektivitasnya. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan baru sehubungan dengan program tersebut tidak akan didukung oleh data. Karena itu, evaluasi program bertujuan untuk menyediakan data dan informasi serta rekomendasi bagi pengambil kebijakan untuk memutuskan apakah akan melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan program.

#### **1.4. Analisis Perkembangan Wilayah**

##### **1.4.1. Content Analysis**

Analisis isi (Content Analysis) merupakan pembahasan mendalam terhadap sisi suatu informasi tertulis atau tercetak. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi baik surat kabar, berita, iklan, maupun bahan dokumentasi formal. Analisis isi dapat dipergunakan dengan syarat (Eriyanto, 2011):

1. Data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi;
2. Ada keterangan pelengkap atau kerangka teori yang menerangkan tentang isi permasalahan sebagai metode pendekatan terhadap data;
3. Kemampuan teknis untuk mengolah bahan/data yang dikumpulkan.

Analisis Isi (content analysis), yaitu suatu metode untuk mengkaji substansi dan konsistensi dari suatu kebijakan, program, dan/atau perangkat hukum tertentu

yang berkaitan dengan suatu permasalahan tertentu. Dalam hal ini, analisis isi difokuskan untuk menganalisis berbagai kebijakan dan strategi pembangunan yang tertuang dalam berbagai dokumen pembangunan kabupaten/kota dan peraturan perundangan yang berlaku. Melalui analisis isi ini kemudian dapat teridentifikasi posisi kawasan perdesaan dalam konstelasi regional dan global untuk mengetahui kedudukan deliniasi kawasan perdesaan terhadap lokasi yang lebih makro secara administrasi. Adapun langkah-langkah review kebijakan menggunakan analisis isi (Content Analysis) sebagai berikut:

- a. Review literatur dan kebijakan mengenai penelitian dan tulisan multidisipliner lainnya yang berkaitan dengan pengembangan sektor perikanan pada kawasan minapolitan. Tujuan tahapan ini untuk mendekonstruksi tulisan yang ada.
- b. Pengenalan pola untuk mengidentifikasi pola yang serupa dari informasi yang bersifat acak. Tujuannya mengklasifikasikan secara umum konsep yang ada dan kemudian melihat kemiripan pola secara lebih detail.
- c. Identifikasi konsep pengembangan kawasan minapolitan, hubungannya dengan program pengembangan kawasan minapolitan.
- d. Konsepsualisasi untuk mengidentifikasi pengembangan sektor perikanan pada kawasan minapolitan yang terdapat pada masing-masing kebijakan.

#### **1.4.2. Analisis Ekonomi Wilayah**

Analisis perekonomian wilayah menyediakan informasi tentang hal-hal yang terkait dengan kondisi eksisting wilayah pengembangan, baik menyangkut besaran PDRB dan pertumbuhannya, komoditi yang mempunyai keunggulan komparatif, aspek ketenaga kerjaan yang menjadi faktor kunci input produksi, dampaknya terhadap pendapatan masyarakat maupun multiplier efek yang ditimbulkan terutama bagi perekonomian daerah. Selain itu analisis ekonomi juga membuat perbandingan relatif wilayah perencanaan dibandingkan dengan wilayah lain, perekonomian wilayah provinsi, dan juga perekonomian nasional.

### **1.4.3. Analisis Kependudukan**

Analisis kependudukan bertujuan untuk memberikan deskripsi demografi kependudukan diantaranya ukuran, struktur, distribusi penduduk, dan bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta kondisi sosial budaya masyarakat. Analisis aspek ini dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu. Analisis sosial budaya dan kependudukan yang diperlukan adalah sebagai berikut:

#### **A. Analisis Sebaran Penduduk**

Sebaran penduduk berguna untuk melihat daya tampung lahan terhadap jumlah penduduk, sekaligus untuk mengidentifikasi pemerataan pembangunan, keseimbangan wilayah serta untuk melihat daya tampung sarana prasarana social ekonomi suatu wilayah. Sebaran penduduk dapat dilihat melalui jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di masing-masing wilayah.

#### **B. Analisis Pertumbuhan Penduduk**

Pertumbuhan penduduk dapat juga diartikan sebagai perubahan dalam bilangan penduduk sepanjang masa, yang boleh diperkirakan sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran.

#### **C. Analisis Kepadatan Penduduk**

Kepadatan penduduk bruto (crude density population) adalah hasil perhitungan dari jumlah penduduk tahun tersebut dalam satuan jiwa dibagi dengan luas lahan yang ada dalam satuan kilometer persegi. Kepadatan penduduk bruto dapat diformulasikan sebagai berikut:  $KPK = P/L$

KPK : Jumlah penduduk (jiwa/km<sup>2</sup>).

P : Jumlah penduduk (jiwa)

L : Luas wilayah (km<sup>2</sup>)

## **1.5. Analisis Subsistem Minapolitan**

### **1.5.1. Analisis Minabisnis Hulu**

#### **A. Analisis Deskriptif Subsistem Minabisnis Hulu**

Terdiri atas analisis terhadap industri-industri yang menghasilkan barang-barang modal bagi kegiatan minapolitan yang meliputi:

a) Industri perbenihan/pembibitan

Analisis ini menjelaskan mengenai jenis komoditas yang dapat dikembangkan pada wilayah studi dan unit usaha yang berkaitan dengan bahan baku dan pembibitan yang mencakup jenis unit usaha pengembangan pembibitan, sebaran lokasi unit usaha pembibitan, status kepemilikan serta pengelolaan pengembangan, pengaruh faktor geografis terhadap pengembangan industri perbenihan dan pembibitan serta industri perbenihan di luar wilayah studi yang mensupply benih, bibit ikan untuk wilayah studi.

b) Industri agrokimia (pakan ikan)

Analisis ini menjelaskan mengenai ketersediaan industri agrokimia berupa pakan ikan yang menunjang pengembangan kawasan minapolitan di wilayah studi yang berkaitan dengan unit usaha cakupan jenis unit usaha pengembangan pupuk dan pakan ikan, pengelolaan pengembangan dan cakupan skala usaha pemasaran hasil industri, industri agrokimia yang mensupply kebutuhan pupuk serta pestisida di wilayah studi.

c) Industri mesin dan peralatan budidaya tambak

Analisis ini mencakup analisis yang terkait dengan teknologi perikanan budidaya pada wilayah studi. Cakup analisis untuk industri ini antara lain : jenis teknologi perikanan budidaya yang dipakai, pengaruh faktor geografis terhadap penerapan industri mesin dan peralatan yang diperlukan, jenis usaha otomotif yang terdapat di wilayah studi, cakupan agro – otomotif di wilayah studi, otomotif di luar wilayah studi yang mensupply kebutuhan mesin untuk pengembangan agropolitan di wilayah studi.

d) Industri pendukung kegiatan minapolitan

Analisis ini mendeskripsikan industri pendukung kegiatan minapolitan, khususnya yang terkait dengan ketersediaan sumber daya energi, yang meliputi : keterkaitan kondisi fisik geografis terhadap industri pendukung kegiatan minapolitan dan sumber daya energi yang diperlukan, jenis usaha industri pendukung kegiatan minapolitan yang dikembangkan di wilayah studi, cakupan layanan usaha Industri pendukung kegiatan pertanian hortikultura untuk wilayah studi.

## **B. Matriks Analisis Pengembangan Subsistem Minabisnis Hulu**

Matrik analisis pengembangan ini digunakan pengembangan sistem minabisnis hulu yang langsung mengacu pada komoditi unggulan di wilayah studi. Penyusunan matriks ini berdasarkan hasil dari analisis subsistem minabisnis hulu secara keseluruhan, hasil analisis kemampuan lahan dan ketersediaan lahan. Adapun variabel yang digunakan dalam matriks meliputi bibit, peralatan pertanian, pupuk, obat-obatan, teknologi. Matriks ini menganalisis potensi dan masalah dari masing-masing variabel

### **1.5.2. Analisis Subsistem On Farm**

#### **A. Analisis Deskriptif Subsistem Usaha Tani**

Tujuan analisis ini terutama digunakan sebagai masukan guna mengadakan estimasi terhadap dampak pengembangan komoditas yang terutama akan menggunakan tolak ukur penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan petani ikan. Analisis ini secara deskriptif menjelaskan mengenai kegiatan yang menggunakan barang-barang modal dan sumberdaya alam untuk menghasilkan komoditas perikanan primer. Termasuk dalam hal ini adalah sumber daya manusia, lahan, sarana produksi perikanan, prasarana pendukung budidaya perikanan dan lembaga pembiayaan.

- a) Sumber Daya Manusia, menganalisis peranan SDM dalam sektor perikanan (terkait jumlah), peranannya dalam pengembangan sektor perikanan, usaha pengembangan SDM bidang perikanan di wilayah studi.

- b) Lahan perikanan, menganalisis jenis dan luasan lahan perikanan budidaya di wilayah studi, kondisi fisik, kondisi irigasi, jenis komoditi yang dikembangkan untuk masing-masing lahan, sebaran lahan tambak, dan sistem usaha pengembangan lahan tambak wilayah studi.
- c) Sarana Produksi Perikanan, menganalisis ketersediaan dan jenis sarana produksi perikanan di wilayah studi, perolehan sarana produksi perikanan yang menunjang usaha tani (on farm) di wilayah studi.
- d) Prasarana Perikanan, menganalisis ketersediaan dan kondisi prasarana perikanan di wilayah studi yang meliputi prasarana irigasi, prasarana jalan, listrik dan air bersih.
- e) Lembaga Pembiayaan, menganalisis lembaga pembiayaan yang berperan dalam pengembangan kegiatan produksi perikanan di wilayah studi, serta peranan masing-masing lembaga tersebut.

#### **B. Matriks Analisis Pengembangan Sistem Usaha Tani**

Matrik analisis pengembangan ini digunakan pengembangan sistem minabisnis hulu yang langsung mengacu pada komoditi unggulan di wilayah studi. Penyusunan matriks ini menganalisis kegiatan yang menggunakan barang-barang modal dan sumberdaya alam untuk menghasilkan komoditas perikanan primer. Adapun variabel yang digunakan untuk matriks ini adalah pekerja, lahan, pembiayaan produksi perikanan. Matriks ini menganalisis potensi dan masalah dari masing-masing variabel.

#### **1.5.3. Analisis Minabisnis Hilir**

##### **A. Analisis Deskriptif Subsistem Minabisnis Hilir**

Analisis Sub-sistem pengolahan meliputi industri yang mengolah komoditas perikanan primer (agroindustri) menjadi produk olahan baik produk antara (intermediate product) maupun produk akhir (finish product). Termasuk di dalamnya industri makanan, industri minuman, biofarmaka, dan lain sebagainya. Analisis deskriptif ini meliputi :

- a) Sumber Daya Manusia, menganalisis mengenai potensi SDM dalam mengolah hasil perikanan, sistem SDM yang mengelola hasil perikanan

dan peranan pemerintah dalam mengembangkan SDM untuk mengelola hasil perikanan di wilayah studi.

- b) Sarana Industri Pengolahan, menganalisis ketersediaan dan jenis sarana pengelolaan perikanan di wilayah studi, perolehan sarana pengelolaan perikanan yang menunjang usaha tani dan peranan pemerintah dalam menyediakan sarana pengelolaan perikanan.
- c) Prasarana Industri Pengolahan, menganalisis ketersediaan dan kondisi prasarana pengelolaan perikanan di wilayah studi yang meliputi prasarana irigasi, prasarana jalan, prasarana listrik, prasarana air bersih.
- d) Pembiayaan, menganalisis lembaga pembiayaan yang berperan dalam pengembangan kegiatan pengelolaan perikanan di wilayah studi, serta peranan masing-masing lembaga tersebut.

#### **B. Matriks Analisis Pengembangan Subsistem Minabisnis Hilir**

Matrik analisis pengembangan ini digunakan pengembangan sistem minabisnis hilir yang berupa industri yang mengolah komoditas perikanan menjadi produk olahan baik produk antara (intermediate product) maupun produk akhir (finish product). Pilihan untuk memfokuskan pengembangan sistem minabisnis industrial pada elemen subsistem hilir didasarkan pada kenyataan bahwa sistem ini memiliki fleksibilitas skala usaha yang lebih mudah diterapkan di perdesaan. Matriks ini digunakan untuk jenis industri hilir primer yang akan dikembangkan secara intensif. Selanjutnya kegiatan minabisnis hilir yang akan dikembangkan secara intensif haruslah memenuhi beberapa kriteria yakni:

- 1) Berskala Industri rumah tangga yang mudah ditumbuhkembangkan di wilayah studi.
- 2) Dapat menimbulkan dampak perekonomian daerah secara cepat dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
- 3) Berbahan baku lokal.
- 4) Metode produksinya telah dikenal/mudah dikuasai oleh masyarakat.
- 5) Sebagian besar produknya dapat diserap oleh pasar lokal.
- 6) Memiliki potensi pangsa pasar yang menjanjikan.

- 7) Diutamakan yang memiliki kekhasan tertentu yang bisa menjadi ciri/ikon wilayah perencanaan.

## 1.6. Studi Literatur Terkait.

Tabel 2 1 Studi Literatur

Penulis	Judul	Variabel	Metode	Hasil
<b>Kusvita 2013</b>	Evaluasi dan strategi pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Bogor	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Dimensi agroindustry</li> <li>☞ Dimensi pemasaran</li> <li>☞ Dimensi usaha tani</li> <li>☞ Dimensi infrastruktur</li> <li>☞ Dimensi suprastruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Analisis Deskriptif Kualitatif dan Kuantitatif</li> <li>☞ Analisis Muti Dimensional Scaling (MDS)</li> <li>☞ Analisis Matriks IFE (Internal Factor Analysis) dan EFE (External Factor Analysis)</li> <li>☞ Analisis SWOT</li> <li>☞ Analisis Quantitative Strategic Planning (QSPM)</li> </ul>	hasil analisis indeks keberlanjutan terhadap 37 atribut kawasan minapolitan yang terdiri dari 8 atribut agroindustry, 6 atribut pemasaran, 8 atribut usahatani, 8 atribut infrastruktur dan 7 atribut suprastruktur menghasilkan nilai indeks keberlanjutan 73.36 (<75) yang berarti status pengelolaan kawasan minapolitan cukup berkelanjutan.
<b>Zakiyah, 2011</b>	Pengembangan Perikanan Budidaya: Efektivitas Program Minapolitan dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan di Kabupaten Gresik	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Dimensi ekonomi: efektivitas, kemandirian, kesinambungan, keterbukaan</li> <li>☞ Dimensi sosio territorial: hub dg actor lain, perlindungan &amp; pengembangan SDM, organisasi spasial, pembangunan lokal</li> <li>☞ Dimensi Lingkungan: proteksi lingk, budidaya ikan dan keberagaman ekologi lokal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Analisis History Chart</li> <li>☞ Analisis Evaluasi IDAQUA</li> </ul>	program minapolitan gagal dan tidak efektif dalam mewujudkan perikanan budidaya berkelanjutan karena tidak adanya kesinambungan dan keseimbangan pada tiga aspek pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosio-teritorial dan lingkungan)
<b>Agustine (2017)</b>	Perencanaan Strategis Pengembangan Minapolitan (Studi Desa Kemangi, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik	<ul style="list-style-type: none"> <li>☞ Deskripsi cakupan rencana strategis minapolitan</li> <li>☞ Penjabaran strategi SWOT pada pelaksanaan minapolitan</li> </ul>	Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Evaluasi pelaksanaan minapolitan secara deskriptif merujuk pada ketentuan pedoman minapolitan dengan hasil studi yang menyatakan bahwa Desa Kemangi telah mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah.
<b>Haryono 2004</b>	Evaluasi dampak program pengembangan agropolitan terhadap kesejahteraan masyarakat (studi kasus Waliksarimadu, Pemalang)	Perkembangan kecamatan, tingkat kemiskinan, keunggulan kompetitif, sektor basis, pendapatan per keluarga petani, peran kelembagaan	Indeks perkembangan wilayah, shift share analysis, LQ, analisis Chi Suqre, Corespondence Analysis, Logit Model, analisis deskriptif	Peningkatan perkembangan kecamatan, tingkat kemiskinan tidak berkurang, meningkatnya sektor basis, meningkatnya kompetensi pertanian, peningkatan pendapatan perkapita, kelembagaan berfungsi namun belum optimal.
<b>Ulum, Haryono, &amp;</b>	Analisis peran multiaktor dalam implimentasi kebijakan	☞ Komunikasi dan sumber daya dalam implementasi kebijakan minapolitan	Penelitian deskriptif kualitatif	implementasi kebijakan Minapolitan di Desa Srowo sampai sejauh ini belum

<b>Rozikin, 2013</b>	minapolitan berbasis sustainable development (studi pada pilot project minapolitan Desa Srowo, Gresik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>☰ Peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam kemitraan</li> <li>☰ Pola kemitraan dalam implementasi kebijakan minapolitan</li> </ul>	optimal, hal ini dikarenakan pemerintah tidak mampu mengkomunikasikan dan memberikan pemahaman kebijakan minapolitan kepada masyarakat.
----------------------	--	--	---

